

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI KELURAHAN BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

**Arif Herman Saputro**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, [arif.23538@mhs.unesa.ac.id](mailto:arif.23538@mhs.unesa.ac.id)

**Muhammad Farid Ma'ruf**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, [muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Bendo, Kabupaten Magetan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat kelurahan hingga warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dinamis namun tidak merata di setiap tahapan. Pada tahap perencanaan, partisipasi tergolong cukup baik melalui forum Musrenbang, di mana sebagian besar usulan warga diakomodasi, meskipun implementasinya di tingkat RT belum konsisten. Partisipasi pada tahap pelaksanaan lebih bersifat komplementer dalam bentuk gotong royong dan pengawasan informal, sementara pekerjaan teknis didominasi oleh pihak ketiga. Tingkat partisipasi tertinggi ditemukan pada tahap pemanfaatan, di mana masyarakat secara aktif menggunakan dan merawat fasilitas yang ada, bahkan mampu mendorong pemberdayaan kelompok disabilitas. Namun, partisipasi pada tahap evaluasi menjadi titik terlemah; prosesnya cenderung informal, tidak terstruktur, dan kurang transparan, sehingga masyarakat belum memiliki peran signifikan dalam menilai keberhasilan program. Kesimpulannya, meskipun partisipasi dalam perencanaan dan pemanfaatan sudah kuat, penguatan mekanisme evaluasi yang formal dan terbuka serta peningkatan transparansi menjadi kunci untuk mewujudkan siklus pembangunan yang sepenuhnya partisipatif dan akuntabel di Kelurahan Bendo.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Kelurahan, Musrenbang, Fasilitas Umum, Evaluasi Partisipatif.

### **Abstract**

This research aims to analyze in depth community participation in the public facility development cycle in Bendo Village, Magetan Regency, which includes the planning, implementation, utilization, and evaluation stages. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and documentation studies of various stakeholders, ranging from village officials to residents. The research results show that community participation runs dynamically but is not evenly distributed at each stage. In the planning stage, participation is quite good through the Musrenbang forum, where most citizen proposals are accommodated, although implementation at the RT level has not been consistent. Participation in the implementation stage is more complementary in the form of mutual cooperation and informal supervision, while technical work is dominated by third parties. The highest level of participation is found in the utilization stage, where the community actively uses and maintains existing facilities, even being able to encourage empowerment of disability groups. However, participation in the evaluation stage becomes the weakest point; the process tends to be informal, unstructured, and lacks transparency, so the community does not yet have a significant role in assessing program success. In conclusion, although participation in planning and utilization is already strong, strengthening formal and open evaluation mechanisms as well as increasing transparency are key to realizing a fully participatory and accountable development cycle in Bendo Village.

**Keywords:** Community Participation; Village Development; Musrenbang; Public Facilities; Participatory Evaluation.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hal ini, keberadaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pasar, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi instrumen vital. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan

yang partisipatif, khususnya melalui lembaga paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan. Sebagai ujung tombak pemerintahan, kelurahan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan fasilitas umum adalah partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi syarat efektivitas pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat telah menjadi paradigma utama dalam pembangunan. Cohen & Uphoff (1977) menekankan bahwa partisipasi bukan hanya keterlibatan pasif, melainkan meliputi kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan. Sementara itu, Arnstein (1969) mengembangkan model "Ladder of Citizen Participation", yang menggambarkan tingkatan partisipasi dari manipulasi hingga kontrol penuh. Partisipasi yang sejati hanya dapat terjadi ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan fasilitas umum, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan akan menciptakan rasa memiliki, meningkatkan transparansi, dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Sayangnya, dalam realitas di lapangan, partisipasi masyarakat di banyak kelurahan, termasuk Kelurahan Bendo, Kabupaten Magetan, masih belum optimal. Banyak forum Musrenbang hanya menjadi ruang formalitas tanpa diskusi mendalam mengenai kebutuhan warga. Hal ini menyebabkan pembangunan seringkali tidak sesuai dengan prioritas lokal. Awainah et al. (2024) menunjukkan bahwa ketika partisipasi masyarakat rendah, efektivitas pembangunan menurun dan proyek sering kali tidak tepat sasaran. Di sisi lain, pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat akan menghasilkan output yang lebih berkelanjutan dan responsif. Program Community-Led Total Sanitation (CLTS) di India, misalnya, terbukti sukses karena melibatkan masyarakat sejak awal (AFP, 2018).

Fasilitas umum memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Aksesibilitas jalan dan jembatan dapat mempercepat mobilitas dan perdagangan antarwilayah. Pasar menjadi wadah interaksi ekonomi yang menghidupkan kegiatan lokal. Fasilitas kesehatan dan pendidikan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Baiocchi (2003) dalam penelitiannya tentang participatory budgeting di Brasil menyatakan bahwa pelibatan warga dalam perencanaan anggaran pembangunan berkontribusi besar terhadap akuntabilitas dan keberhasilan proyek. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas umum tidak boleh dilepaskan dari keterlibatan komunitas lokal sebagai penerima manfaat langsung.

Di Kelurahan Bendo, berbagai tantangan menghambat optimalisasi partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kurangnya akses informasi menjadi hambatan utama. Perangkat kelurahan, sebagai pelaksana teknis di lapangan, belum maksimal dalam memberikan ruang partisipasi yang setara. Akibatnya, masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Data dari Musrenbang tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas usulan warga berkisar pada

perbaikan jalan, drainase, dan penerangan jalan. Namun, hanya sebagian kecil yang direalisasikan. Hal ini menandakan belum optimalnya saluran aspirasi dan mekanisme respon pemerintah kelurahan terhadap usulan warga.

NO	Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Pokmas)	Volume
1	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		1 paket
2	Trotoarisasi Jalan Raya Bendo	Kel Bendo	510 m
3	Rehabilitasi pendopo Lapangan	Lapangan Bendo	1 paket
4	Pembuatan saluran Pembuangan air kotor perbatasan duwet dan Bendo	RT 25 RW 11	1,2 x 300 m
5	Pembangunan Ruang Ramah anak tahap 2	Barat Kantor BPP	1 paket
6	Pemasangan paving di RT 21, Pasar, RT 01	RT 01, 21, Pasar	535 m
7	Pembangunan saluran pembuangan air kotor	RT 07, 16, dan 28	
8	Peningkatan Jalan Penyeberangan Sungai Bendo 2	RT 14	4 x 15 m
9	Pengaspalan jalan	RT 20 RW 08	3 x 120 m
10	Powervan trak lapangan dan sarana olah raga	Lapangan olah raga	
11	Pembangunan Trotoarisasi Jalan raya Bendo (Jalan Raya Bendo) Jembatan s/d Depan Kantor Kelurahan	Jalan Raya Bendo	510 m
12	Pembuatan saluran Pembuangan air kotor perbatasan duwet dan Bendo	RT 25 RW 11	1,2 x 300 m
13	Pengaturan Jalan Gandu		250 m
14	Pengerasan jalan di sawah selatan Bendo		300 m
15	Pengaturan jalan di Bendo 1		250 m

Tanggal 20 Januari 2023  
 LUKAH BENDO  
 SUTRIBNO,SH  
 NIP. 19671115 199202 1003

Gambar 1. Daftar Rencana Kegiatan Tahun 2024  
 Sumber: Dokumen Arsip Kelurahan Bendo, 2023

Minimalnya forum diskusi warga juga memperburuk situasi. Menurut Rodiyah et al. (2021), pelayanan publik yang efektif membutuhkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Namun di Kelurahan Bendo, agenda pembangunan cenderung disusun secara top-down, tanpa konsultasi yang menyeluruh. Hal ini menyebabkan gap antara perencanaan dan kebutuhan aktual masyarakat. Pemerintah kelurahan seharusnya menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka agar warga bisa memberikan masukan dan terlibat dalam prosesnya. Sayangnya, praktik ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya menjadi landasan transparansi ini.

Dari sisi struktural, tidak adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kelurahan menambah tantangan. BPD yang ada di desa berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat. Ketidakhadiran BPD di kelurahan membuat mekanisme pengawasan dan aspirasi warga kurang kuat. Selain itu, ASN di kelurahan lebih sibuk mengurus administratif daripada terlibat aktif dalam memahami dinamika sosial masyarakat. Hal ini senada dengan temuan Islamy (Subarsono, 2006:14) bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana pelibatan aktor lokal dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dengan berbagai tantangan tersebut, partisipasi masyarakat di Kelurahan Bendo dalam pembangunan fasilitas umum belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, tujuan utama dari pembangunan partisipatif adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?* Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini ingin menggambarkan proses, tantangan, dan potensi dalam

memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk memberikan masukan bagi pemerintah kelurahan dan warga agar mampu menciptakan pola partisipasi yang lebih efektif. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara partisipasi warga dan efektivitas pembangunan daerah. Sementara secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terlibat aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan lokal yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis aspirasi warga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Menurut Creswell (2018), pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi, serta dampak keterlibatan masyarakat terhadap efektivitas pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat di Kelurahan Bendo dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah yang demokratis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi simbol keterbukaan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat memenuhi kebutuhan warga. Berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi dari Cohen & Uphoff (1977), penelitian ini membagi partisipasi ke dalam empat bentuk utama: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum utama di mana masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan mereka, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Tabel 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Bendo Tahun 2022-2025

No	Tahun	Tanggal Pelaksanaan
1	2022	27 Januari 2022
2	2023	20 Januari 2023
3	2024	24 Januari 2024
4	2025	12 Januari 2025

Sumber: Dokumen Arsip Kelurahan Bendo, 2025

Tabel 1. menunjukkan pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Bendo dari tahun 2022 hingga 2025. Forum ini diadakan secara rutin setiap tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan untuk melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun partisipasi dalam perencanaan terlihat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan cenderung terbatas. Masyarakat lebih sering terlibat dalam kegiatan gotong royong, sementara pelaksanaan fisik pembangunan umumnya dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang substantif.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan juga menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Di Kelurahan Bendo, pembangunan sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suyatno, Pengawas Lingkungan I Kelurahan Bendo, pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan respons positif pemerintah terhadap kebutuhan warga. Hal ini menciptakan siklus positif yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Evaluasi pembangunan merupakan tahap akhir yang menandai kematangan demokrasi lokal. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pengawasan masyarakat secara partisipatif. Mekanisme ini penting sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan program dan menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknokratis pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh siklus pembangunan.

Kelurahan Bendo dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya yang sesuai dengan fokus kajian. Meskipun Musrenbang dirancang untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, sejauh mana pelibatan tersebut terjadi secara substantif masih perlu ditelusuri. Keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bendo menjadi faktor penting dalam memahami dinamika partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, dengan menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen resmi.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka. Observasi dilakukan pada kegiatan Musrenbang untuk memahami dinamika interaksi dan tingkat keterlibatan masyarakat. Data sekunder dari dokumen resmi dan laporan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bendo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff (1977), yang membagi partisipasi ke dalam empat bentuk utama yaitu:

#### 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Dalam konteks pengambilan keputusan pembangunan, keterlibatan warga tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak menyampaikan aspirasi dan memengaruhi arah kebijakan. Seperti dijelaskan oleh Pateman (1970), partisipasi yang bermakna mendidik warga negara untuk terlibat aktif dalam proses politik dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Hal ini relevan dalam konteks Kelurahan Bendo, di mana Musrenbang menjadi mekanisme utama penjangkaran aspirasi.

Proses partisipatif di Kelurahan Bendo menunjukkan struktur yang cukup rapi, dengan tahapan musyawarah mulai dari tingkat RT hingga kelurahan. Berdasarkan dokumen rencana pembangunan, sebagian besar usulan masyarakat telah dimasukkan ke dalam daftar kegiatan prioritas yang dikategorikan menurut sumber pendanaannya, baik dari APBD Kabupaten maupun dana kelurahan. Namun demikian, tidak semua kegiatan memperoleh kejelasan sumber pembiayaan, yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengusulan tidak selalu diikuti oleh kepastian implementasi.

NO	Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Pokmas)	Volume	Alasan
1	Pengerasan Jalan Gandu	Lingkungan Gandu	250 m	Masih dim kondisi sedang
2	Pengerasan jalan di sawah selatan Bendo	Bendo 2	300 m	Masih dim kondisi sedang
3	Pengerasan jalan di Bendo 1	Bendo 1	250 m	Masih dim kondisi sedang

Gambar 2. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Sumber: Dokumen Arsip Kelurahan Bendo, 2023

Hal ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2023) bahwa transparansi dan kepastian tindak

lanjut merupakan faktor penting dalam keberhasilan partisipasi.

Tingkat partisipasi di Kelurahan Bendo dapat dianalisis menggunakan teori tangga partisipasi Arnstein (1969), yang membedakan partisipasi ke dalam delapan tingkat, mulai dari manipulasi hingga kendali warga. Praktik di Kelurahan Bendo sebagian besar berada pada tingkat “kemitraan”, namun masih terdapat wilayah yang hanya mencapai tahap “konsultasi” atau bahkan “pelunakan”. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya konsistensi pelaksanaan di lapangan agar tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga kualitas interaksi dan keterbukaan antar pihak.

Selain itu, pendekatan Collective Impact dari Kania dan Kramer (2011) juga relevan untuk menilai kerja sama antaraktor dalam Musrenbang. Musrenbang sebagai forum penyusunan agenda bersama harus didukung oleh koordinasi yang baik antarlevel, mulai dari warga, RT/RW, hingga kelurahan. Namun tanpa adanya shared measurement dan mekanisme umpan balik yang efektif, proses ini berisiko menjadi seremonial. Hal ini senada dengan Alimuddin et al. (2021), yang menekankan pentingnya integritas pemangku kepentingan lokal dalam menjamin partisipasi yang inklusif.

Dengan demikian, meskipun Musrenbang Kelurahan Bendo telah memberikan ruang bagi partisipasi warga, proses tersebut belum sepenuhnya merata dari sisi kualitas dan pelaksanaannya. Dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal serta penegakan prinsip transparansi dan inklusivitas agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif warga. Sebagaimana ditegaskan oleh Kusumawati dan Sulaiman (2024), partisipasi yang autentik tidak hanya memperluas ruang demokrasi, tetapi juga menjamin keberpihakan pembangunan pada keadilan sosial.

#### 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Usulan pembangunan dari warga Kelurahan Bendo yang disampaikan melalui forum Musrenbang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kelurahan, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti sarana dan prasarana umum. Sebagian besar usulan tersebut telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan direspons secara konkret. Namun, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam penyusunan teknis DPA dan DPPA, yang merupakan ranah administratif pemerintah kelurahan (Cohen & Uphoff, 1977).

Pelaksanaan pembangunan menjadi tahap penting bagi masyarakat untuk terlibat langsung,

dengan berbagai bentuk partisipasi seperti pengerahan tenaga kerja dan pengawasan proyek. Meskipun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bendo menunjukkan variasi, kontribusi paling umum adalah dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti, terutama pada tahap awal seperti pembersihan lokasi proyek. Hal ini sejalan dengan pandangan Chambers (1997) yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan.

Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung akibat kesibukan dan prioritas pekerjaan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat di Kelurahan Bendo berada pada tingkat antara "konsultasi" dan "kemitraan," di mana warga terlibat dalam pengawasan dan diskusi, tetapi kontrol akhir tetap di tangan pemerintah kelurahan dan kontraktor. Penelitian oleh Harjanto et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan lembaga kemasyarakatan lokal dan pemanfaatan teknologi komunikasi dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bendo sudah berjalan dengan prinsip kemitraan, penguatan kelembagaan lokal dan pemanfaatan media komunikasi yang inovatif sangat diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan menjadi usaha kolektif yang mengakar kuat di masyarakat, bukan sekadar agenda pemerintah (Firdaus & Mulyani, 2023).

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan di Kelurahan Bendo menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam menggunakan dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun. Keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan hasil tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Menurut Oakley dan Marsden (1984), partisipasi dalam tahap pemanfaatan mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengelola hasil pembangunan secara mandiri. Hal ini terlihat dari inisiatif warga dalam melakukan kerja bakti dan membentuk tim pemeliharaan yang melibatkan Karang Taruna, yang sejalan dengan pendekatan "community-based development" yang dikemukakan oleh Pretty (1995).

Namun, meskipun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas umum cenderung positif, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas yang memerlukan biaya besar. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bendo mencatat bahwa partisipasi warga dalam pemeliharaan

fasilitas besar masih kurang optimal, yang menunjukkan adanya ketergantungan pada anggaran pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Arnstein (1969) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Bendo berada pada tingkatan antara "penenangan" dan "kemitraan," di mana masyarakat terlibat secara simbolik dalam pengambilan keputusan yang memerlukan dana besar.

Lebih jauh, keberadaan fasilitas seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pusat jajanan (Pujasera) tidak hanya memberikan manfaat sosial-ekonomi, tetapi juga mendukung pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan inklusivitas sosial dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan sinergi antara semangat gotong royong, kelembagaan lokal, dan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat secara inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial (Wahyuni & Arifin, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun partisipasi masyarakat di Kelurahan Bendo menunjukkan arah yang positif, optimalisasi partisipasi dalam pemeliharaan jangka panjang dan sinkronisasi prioritas proyek tetap menjadi aspek krusial yang perlu didorong. Keberhasilan pemanfaatan hasil pembangunan sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif warga untuk menjaga dan merawat fasilitas, di mana nilai gotong royong dan rasa memiliki memainkan peran sentral.

### 4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Kelurahan Bendo masih bersifat informal dan belum terstruktur secara sistematis. Meskipun pemerintah kelurahan, melalui Lurah Bendo, menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam forum Musrenbang dan saluran informal, kenyataannya banyak warga yang merasa tidak terlibat secara langsung dalam proses evaluasi. Menurut Cohen & Uphoff (1977), partisipasi dalam evaluasi seharusnya mencakup umpan balik yang sistematis, namun di Bendo, umpan balik yang ada lebih bersifat ad hoc dan tidak terdokumentasi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diklaim dan pengalaman faktual warga.

Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam proyek-proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, yang sering kali tidak melalui mekanisme konsultatif. Bapak Joko Waseso, seorang warga, mengungkapkan bahwa forum evaluasi formal tidak pernah diselenggarakan, dan Musrenbang tidak memberikan ruang yang memadai untuk umpan balik. Situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tahap konsultasi,

sebagaimana diungkapkan oleh Arnstein (1969), di mana warga hanya diberi ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa kontrol nyata atas proses evaluasi.

Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk membuka ruang komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), partisipasi internal lembaga ini juga terbatas oleh kesibukan anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bergantung pada kemauan, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai. Menurut Pretty (1995), partisipasi yang masih bersifat konsultatif perlu ditingkatkan menuju partisipasi interaktif, di mana masyarakat benar-benar terlibat dalam penilaian dan perbaikan program.

Secara keseluruhan, evaluasi pembangunan di Kelurahan Bendo belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Tanpa sistem evaluasi yang inklusif dan berkelanjutan, risiko pemborosan anggaran dan ketimpangan program akan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih formal dan terstruktur, melibatkan representasi warga dari berbagai elemen sosial, agar pembangunan dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang partisipatif dan transparan dapat terwujud.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Masyarakat Kelurahan Bendo terlibat dalam pengambilan keputusan melalui Musrenbang dan forum RT/RW, sesuai dengan gagasan demokrasi partisipatif. Namun, partisipasi seringkali bersifat prosedural, di mana meskipun usulan warga diakomodasi, ada lingkungan yang terpinggirkan akibat proses musyawarah yang tidak konsisten dan kurang transparan. Dalam kerangka Arnstein, partisipasi ini masih berada pada tingkat "tokenisme" atau "placation," di mana warga hanya didengar tanpa memengaruhi keputusan akhir secara nyata.

Bentuk nyata partisipasi muncul melalui gotong royong dan pengawasan informal, sejalan dengan prinsip "putting the last first" dari Chambers dan konsep partisipasi interaktif dari Pretty. Pendekatan Collective Impact mulai terlihat dalam upaya menyelaraskan agenda bersama, meskipun ketimpangan kapasitas dan wewenang antar aktor menjadi tantangan untuk kolaborasi yang inklusif.

Pada tahap pemanfaatan, kepemilikan warga terhadap fasilitas umum meningkat berkat keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Model community-based development dari Pretty menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan fasilitas dapat menjamin keberlanjutan, meskipun pembiayaan pemeliharaan masih bergantung pada pemerintah.

Evaluasi partisipatif di Bendo masih bersifat informal dan top-down, berada pada level konsultasi menurut

Arnstein, padahal regulasi mengamanatkan keterlibatan warga dalam penilaian program. Tanpa sistem umpan balik yang terstruktur, hasil evaluasi kurang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal dan mekanisme evaluasi terbuka yang rutin menjadi kunci agar semua tahap pembangunan mencerminkan suara dan kebutuhan warga.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan sebagai upaya perbaikan dan penguatan partisipasi masyarakat di masa mendatang.

1. Pemerintah Kelurahan perlu memperkuat mekanisme musyawarah di tingkat RT/RW.
2. Pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi pembangunan.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan fisik pembangunan.
4. Peningkatan kapasitas dan peran LPM serta lembaga masyarakat lainnya.
5. Perlu adanya sistem evaluasi partisipatif pasca pembangunan.
6. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Penerapan *e-Government* dan *e-Governance* di Tingkat Kelurahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alimuddin, M., Sari, N., & Pratama, D. (2021). Integritas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–57.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Awainah, N., Suryanto, T., & Rohman, A. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 12–24.
- Baiocchi, G. (2003). *Radicals in Power: The Workers' Party and Experiments in Urban Democracy in Brazil*. London: Zed Books.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaca: Cornell University.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Firdaus, A., & Mulyani, N. (2023). Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(2), 66–78.
- Harjanto, B., Latifah, D., & Setiawan, R. (2024). Inovasi Partisipasi Digital dalam Proyek Infrastruktur Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(1), 77–90.
- Islamy, M. I. (2006). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (dikutip dalam Subarsono, 2006:14). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective Impact. *Stanford Social Innovation Review*, 9(1), 36–41.
- Kusumawati, A., & Sulaiman, R. (2024). Inklusivitas Partisipasi Warga dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 6(1), 1–10.
- Lestari, R., Putri, M., & Prabowo, A. (2023). Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Partisipasi dalam Musrenbang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 99–110.
- Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Rodiyah, I., Nurhayati, S., & Anwar, M. (2021). Komunikasi Dua Arah dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 34–48.
- Wahyuni, I., & Arifin, H. (2024). Inklusi Sosial dalam Pemanfaatan Fasilitas Publik Berbasis Partisipasi. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 5(1), 88–101.